

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dari penelitian tentang " Evaluasi Kebijakan Badan Kepegawaian Daerah Terhadap Pengangkatan Honorer UU No 5 Pasal 7 Ayat 2 Tahun 2014 Studi Di Badan Kepegawaian Daerah di Kabupaten Sleman" yang sudah dipaparkan sebelumnya. Maka, dapat disimpulkan bahwa:

1. Efektifitas kebijakan Badan Kepegawaian Daerah Di Kabupaten Sleman, karena keterbatasan jumlah PNS yang ada, maka dalam melakukan penyelesaian pekerjaan di pemerintahan Kabupaten Sleman sangat membutuhkan pegawai honorer untuk membantu memaksimalkan beban pekerjaan serta mengurangi beban pekerjaan pada instansi terkait.
2. Efisiensi kebijakan Badan Kepegawaian Daerah Di Kabupaten Sleman telah mencapai sasaran kerja yang ditetapkan, dan dapat menyelesaikan pekerjaan atau tugasnya dengan baik, serta dapat menggunakan anggaran biaya dalam kebutuhan penerimaan CPNS.
3. Kecukupan dalam evaluasi kebijakan Badan Kepegawaian Daerah Di Kabupaten Sleman dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. Kecukupan

- (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang ada.
4. Perataan dalam evaluasi kebijakan Badan Kepegawaian Daerah Di Kabupaten Sleman bisa dilakukan secara obyektif dan transparan. Oleh karena itu masyarakat diminta tidak mudah percaya dengan adanya joki atau tawaran dari oknum yang tidak bertanggungjawab yang ingin mencari keuntungan pribadi.
  5. Responsifitas dalam evaluasi kebijakan Badan Kepegawaian Daerah Di Kabupaten Sleman telah dilakukan secara berjenjang dan dilakukan melalui pertemuan resmi, namun masih terdapat hambatan/permasalahan yaitu belum adanya kesatuan persepsi dalam mengartikan tenaga honorer yang akan didata, khususnya di Provinsi DI Yogyakarta.
  6. Ketepatan dalam evaluasi kebijakan Badan Kepegawaian Daerah Di Kabupaten Sleman dalam pengangkatan tenaga honorer sudah tepat Proses pengangkatan tenaga honorer itu bertahap mulai dari tahun 2004-2005. Sedangkan pengangkatan mulai dari tahun 2012-2013 masih dalam proses, diangkat bertahap sesuai dengan kuota yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk daerah.
  7. Evaluasi merupakan fase terakhir dalam proses pembuatan kebijakan tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, apabila sudah terbentuk perlu dilakukan

penilaian atas semua perekaman data yang telah masuk. Perekaman data dilakukan agar Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman khususnya Bagian Mutasi yang menangani tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS dan yang melakukan perekaman data serta hasil verifikasi nama-nama, jumlah tenaga honorer yang akan mengikuti test seleksi menjadi CPNS bisa di evaluasi.

8. Keberadaan Tenaga Honorer saat ini tidak jelas karena bukan berkedudukan sebagai PNS maupun PPPK. Adapun beberapa faktor yang menghambat dalam pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS :
  - a. Payung hukum untuk pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS telah berakhir tahun 2014 yaitu dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS.
  - b. Keterbatasan anggaran untuk proses pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS.
  - c. Kelengkapan administrasi tenaga honorer yang ada di Kabupaten Sleman masih belum memiliki berkas yang lengkap sehingga jika dikemudian hari dilaksanakan pengangkatan CPNS dari Tenaga Honorer maka hal ini akan menjadi penghambat dan akan mempersulit Tenaga Honorer yang bersangkutan untuk dapat diangkat menjadi CPNS.

## 4.2 Saran

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, maka adapun saran yang direkomendasikan adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman dan pihak penyelenggara penerimaan CPNS dalam lingkup Kota Sleman untuk tetap obyektif dan transparan agar tidak menimbulkan kesalahan-kesalahan maupun intervensi dan konflik kepentingan yang mempengaruhi kelancaran dan efektivitas pelaksanaan rekrutmen CPNS di Kota Sleman.
2. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman dan pihak penyelenggara pengangkatan Tenaga Honorer Kategori II menjadi calon pegawai negeri sipil dalam Lingkup Kabupaten Sleman diharapkan untuk lebih meningkatkan upaya pengawasan terhadap setiap tahap pelaksanaan kebijakan mengenai pengangkatan Tenaga Honorer Kategori II tersebut.